

AKTOR, AKSES DAN POLITIK LINGKUNGAN DI PERTAMBANGAN TIMAH BANGKA

Erwiza Erman

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ABSTRACT

Tin has been exploited since the early 18th century in the island of Bangka. Since that time, this extractive industry has been a leading export commodity and has given important contributions to the state revenue. Despite already being mined for more than three centuries, only since the Reform era (1998), there has been a series of long and controversial debates over the control of tin resources and its environmental impact. The debates have on this issue has been conducted intensively from 2000 until 2007. However, when the second governor of the province was nominated in 2007, criticisms were reduced, particularly when Babel Hijau Lestari was created by the Governor in July 2007.

This article tries to elucidate the issues on the control over tin resources and environmental damages as a window of opportunity to observe the political motivations of state actors and the local community behind the debates. Unlike the general perception, state actors and the local community are not homogeneous entities. Their views over control of mines and environmental issues are fragmented and contradictory with each other. The different point of views of actors cannot be separated from their struggles to gain political and economic accesses. By looking at a trajectory of control over tin resources, its impact on environment, and the responses of the actors to it, soon we will discover a different environmental politics in relation to the struggles of actors in the period of decentralization and local autonomy.

Keywords: political ecology, actors, access, tin resources and environmental damage, Bangka island.

PENDAHULUAN

Timah sudah ditambang sejak tiga abad lalu dan berada di bawah kontrol rezim yang berbeda-beda. Walaupun demikian, debat-debat

yang kontroversial dan lama mengenai kontrol atas penambangan, pemasaran, dan dampaknya terhadap lingkungan baru, muncul di era Reformasi. Kondisi ini terjadi ketika adanya liberalisasi dalam sistem kontrol eksploitasi dan pemasaran timah, di mana, selain dua perusahaan lama, PT Timah Bangka Tbk dan PT Koba Tin, berdiri perusahaan-perusahaan tambang baru dan penambangan timah ilegal yang disebut dengan istilah Tambang Inkonvensional (TI). Kehadiran perusahaan-perusahaan tambang swasta baru dan penambangan TI telah mampu menyaingi produksi kedua perusahaan lama yang memonopoli bisnis ini sejak lama. Pada saat yang sama, sistem penambangan baru itu sangat rakus, mencari keuntungan secepat mungkin dalam waktu yang relatif singkat tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Akibatnya, pulau Bangka berada ditambang kritis, dan debat-debat mengenai liberalisasi penambangan, pemasaran timah dan kerusakan lingkungan muncul. Terdapat saling tuduh antara perusahaan lama dan baru yang masing-masing mereka menganggap diri legal dan yang lain ilegal (Erwiza Erman 2008). Kemudian diikuti oleh debat-debat dari para politisi, aktor-aktor negara dari tingkat pusat sampai ke daerah, dan masyarakat lokal dalam sejumlah rapat, seminar dan polemik di media massa. Debat-debat itu memperlihatkan intensitas yang tinggi sejak tahun 2000 dan menurun kembali sejak Gubernur Kep. Bangka-Belitung mendirikan Babel Hijau Lestari, sebuah gerakan sosial hijau pada bulan Juli 2007.

Sejauhmana terjadi perubahan dalam kontrol terhadap sumberdaya timah dan sejauhmana pula dampak penambangan terhadap lingkungan dan bagaimana respon pemerintah dan masyarakat lokal terhadap sistem penambangan dan kerusakan lingkungan tersebut? Mengapa terjadi debat kontroversial dan lama, yang seolah-olah ada politik pembiaran pemerintah terhadap penambangan yang serakah yang merusak lingkungan? Apakah karena ketidakmampuan negara ataukah karena aktor-aktor negara memiliki kepentingan politik dan ekonomi di balik politik pembiaran itu? Inilah serangkaian pertanyaan yang hendak dicari jawabannya dalam artikel ini.

Banyak studi yang membahas hubungan tambang dan politik lingkungan dari berbagai perspektif. David Hyndman dan Stuart Kirsch (2003) mengatakan bahwa tambang telah menciptakan problem lingkungan dan respons masyarakat terhadap krisis ekologi tersebut dipandang sebagai resistensi ekologis. Saleem Hassan Ali (2006)

kemudian menemukan bahwa resistensi masyarakat lokal Caledonia terhadap proyek perusahaan tambang tersebut bisa berkurang, karena sifatnya yang transparan, akuntabel dan yang tidak kalah penting menurutnya adalah adanya pemahaman perusahaan yang baik terhadap sistem politik dan budaya setempat. Sementara itu, John Peter Newell (2005) menganalisis tambang dan kerusakan lingkungan dari perspektif politik global. Masalah kerusakan lingkungan merefleksikan pola dominasi Utara atas Selatan (global), antara negara kaya atas negara sedang berkembang, dan antara kelompok-kelompok sosial dan ras yang beruntung dan yang menanggung beban resiko kerusakan lingkungan. Adanya ketimpangan dalam sudut ras dan kelas dalam beban resiko akibat kerusakan lingkungan, atau disebut juga dengan ketidakadilan lingkungan (*environmental injustice*). Konflik mengenai akses ke sumberdaya alam dan kontrol terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya tidaklah semata-mata dikategorikan sebagai konflik atas sumberdaya tambang dan kerusakan lingkungan, tetapi sebenarnya adalah konflik berwajah banyak. Glenn Bank (2002) telah membuktikannya dengan menganalisis debat-debat kontroversial yang berhubungan dengan penambangan berskala besar dan dampak lingkungannya di Melanesia. Adanya tumpang tindih antara sebab-sebab konflik dengan sebab-sebab lain yang membawa kontroversi yang panjang dan lama dalam menangani persoalan kontrol terhadap penambangan dan kerusakan lingkungan.

Studi-studi di atas berguna untuk mempertajam analisis mengenai tambang timah dan masalah lingkungan di Bangka. Konflik mengenai kontrol terhadap penambangan dan kerusakan lingkungan sudah terinternalisasi dalam sejarah ekonomi timah Bangka sejak abad ke-18. Ditinjau dari sejarahnya, siapa yang dirugikan dan diuntungkan dari sistem kontrol rezim yang berbeda-beda atas bisnis pertimahan, dan perubahan-perubahan dalam kebijakan politik dan ekonomi yang menyertainya kemudian, terutama sejak era reformasi, dan debat-debat para aktor, artikel ini akan menganalisis timah dari sudut aktor dan teori akses. Kata akses berbeda dengan pemilikan dan menurut Nancy Lee Peluso dan J.C. Ribot (2003:153), *access is more akin to 'a bundle of powers than to property's notion of a bundle of rights'*. Mengikuti definisi ini, artikel ini akan melihat proses yang dinamis antara aktor-aktor yang pro dan kontra dalam debat-debat penambangan timah dan masalah lingkungan. Aktor-aktor itu adalah birokrat di instansi pemerintah

dan masyarakat lokal. Aktor-aktor dari instansi pemerintah tidak homogen. Begitu juga aktor-aktor dari masyarakat lokal. Semuanya memperlihatkan hubungan kekuasaan antar mereka yang kompleks, didorong oleh kepentingan politik dan ekonomi yang lebih luas. Bagian berikut memfokuskan perhatian pada kontrol atas timah dalam rezim yang berbeda-beda. Bab ini akan memberi penjelasan atas pertanyaan mengapa politik protes dari aktor pemerintah di tingkat kabupaten terhadap pemerintah pusat dan perusahaan tambang timah lama untuk memiliki akses pemilikan saham dan bisnis penambangan timah di Era Reformasi.

PENAMBANGAN DAN TRAYEKTORI KONTROL ATAS TIMAH

Eksplotasi penambangan timah yang terlama di Indonesia dan masih berproduksi sampai kini terdapat di pulau Bangka, masuk dalam provinsi baru, Kepulauan Bangka-Belitung. Eksplotasi timah di Bangka sudah dimulai sejak awal abad ke-18. Dalam usianya yang lebih tiga abad itu, penambangan timah Bangka berada di bawah kontrol negara yang berbeda, seringkali menjadi penyebab munculnya "Perang Sumber" (*War Resources*) meminjam istilah yang diberikan Chris Ballard dan Glenn Banks (2003:287-313). Pada awalnya penambangan TI berada di bawah kontrol Sultan Palembang, baik untuk proses produksi maupun pemasaran timah, sebab pulau Bangka berada di bawah kontrol kekuasaannya. Antara tahun 1722-1799 Sultan Palembang membuat perjanjian kontrak dengan VOC yang memonopoli perdagangan timah bersama dengan lada yang dihasilkan oleh para petani lada Sumatera Selatan. Kontrol atas timah ini kemudian beralih ke pemerintahan Inggris (1812-1816), didahului oleh perang dengan Belanda. Inggris merancang dasar-dasar sistem kontrol atas produksi dan pemasaran timah yang kemudian ditiru oleh Belanda yang mengambil-alih dan menguasai Bangka untuk periode waktu yang begitu lama (1816-1942). Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya, tambang timah dinasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia dan menjadi PN.Timah (1945-1965) pada masa Orde Lama dan pada masa Orde Baru (1966-1998) berubah namanya menjadi PT.Timah Bangka Tbk.

Untuk lebih tiga abad kehadirannya di Bangka, kontrol dalam penambangan timah mengalami perubahan. Di bawah kontrol Sultan Palembang, para bangsawan Palembang dan Bangka dan termasuk

orang-orang kaya Cina dan Arab memperoleh akses menanamkan modalnya dalam berbagai bentuk bisnis. Akses tersebut diberikan oleh Sultan kepada pemilik modal untuk memproduksi timah dalam sistem kongsi dengan mempekerjakan para penambang Cina dan orang-orang Bangka. Mereka memiliki akses untuk memasarkan timah kepada Sultan yang seterusnya dijual berdasarkan kontrak monopoli dengan VOC. Walaupun demikian, para pebisnis timah juga memasarkan timah secara ilegal karena perbedaan harga monopoli dan harga di pasar bebas, begitu tinggi¹. Selama Bangka berada di bawah kontrol Sultan Palembang, penduduk lokal di Bangka memiliki akses untuk menambang dan menjual timah ke pembeli yang datang dari Palembang dan kawasan lain. Di samping mereka memperoleh keuntungan dari pekerjaan menambang, penduduk setempat juga memperoleh keuntungan lain yakni menjual kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan pula oleh tambang dan para penambang yang datang dari Cina ke Bangka, seperti kayu bakar, makanan, ikan, sayur dan buah-buahan serta barang-barang kebutuhan lainnya.

Perubahan-perubahan dalam sistem kontrol atas sumberdaya timah terjadi setelah kehadiran pemerintah Inggris di Bangka. Perubahan pertama melalui kontrol atas sistem politik. Inggris memutuskan afiliasi politik Bangka dengan Kesultanan Palembang. Bangka menjadi daerah otonom, tidak lagi di bawah Kesultanan Palembang. Bangka diperintah oleh Residen Inggris yang berperan mengontrol sumberdaya timah dan mengurus pemerintahan. Kontrol oleh Residen Inggris atas sistem politik Bangka berdampak memperendah status para pemimpin Bangka dan bahkan menghilangkan otonomi mereka dalam berbisnis timah. Sebab Inggris mengontrol langsung proses produksi, merekrut para penambang Cina langsung dari negeri asalnya, serta menyuplai barang-barang kebutuhan pokok dan alat-alat penambangan. Implikasi dari kontrol Inggris ini merupakan awal marjinalnya posisi penduduk lokal dari keuntungan-keuntungan akses ekonomi dan kuasa politik mereka sebelumnya.

¹ Mengenai tarik menarik untuk mencari keuntungan dalam pemasaran timah antara Sultan Palembang, sebagai pemilik tambang dengan Belanda, lihat Erwiza Erman (2008), "Menelusuri Hubungan Bisnis Timah Negara Melayu Masa Lalu dan Refleksinya untuk Masa Kini". Makalah dipresentasikan pada seminar "Dialog Ke-Melayuan," diadakan oleh Pusat Studi Melayu. Universitas Hasanuddin, Makassar. 13 -14 Oktober 2008.

Sistem kontrol dan manajemen pengelolaan timah Inggris diteruskan oleh Belanda. Bahkan, sistem kontrol tersebut semakin diperkuat dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang disebut *Tin Reglement* yang dikeluarkan Belanda pada tahun 1819. Dalam peraturan disebutkan bahwa: (i) Penanganan timah di Bangka langsung di bawah kekuasaan Residen; (ii) Timah dimonopoli oleh pemerintah Belanda; (iii) Penambangan timah oleh perusahaan swasta dilarang (Suyitno 1996:106). Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda ini dapat dilihat sebagai awal dari bagaimana negara [baca: kolonial] semakin kuat mengontrol sumberdaya timah dan penduduknya.

Sistem kontrol atas sumberdaya timah oleh Inggris dan Belanda ini kemudian diresponi dengan politik protes yang mengarah ke konflik bersenjata yang dipimpin oleh para pemimpin Bangka Depati Bahrin, Depati Amir dan Batin Tikal (Erwiza Erman 2009: 41-69) yang pada dasarnya telah mengalami kerugian atas hilangnya akses mereka terhadap sumberdaya timah dan sekaligus juga terputusnya hubungan politik dengan Sultan Palembang yang sudah berlangsung lama dan telah dilapisi pula dengan hubungan kekeluargaan. Perjuangan ketiga pemimpin dapat dipadamkan Belanda. Pada tahun 1850, bermula kontrol Belanda terhadap Bangka dan timahnya. Timah Bangka menjadi sebuah perusahaan negara dengan nama *Bangka Tin Winning* (BTW) yang diawasi oleh pasukan bersenjata yang bertugas mengawasi tenaga kerja Cina dan areal produksi timah.

Sistem kontrol dalam perusahaan negara kolonial tersebut tidak terpisah dari pengelolaan pemerintahan sampai tahun 1913, yakni sampai adanya reorganisasi pemerintahan sebagai akibat diterapkannya desentralisasi awal abad ke-20. Selama periode 1850-1913, Residen Belanda yang memerintah di Bangka memiliki fungsi ganda; sebagai administrator dan sebagai kepala tambang². Selama periode tersebut, perkembangan yang tidak seimbang terjadi antara penduduk setempat yang jauh tertinggal di semua bidang dengan perkembangan timah Bangka yang semakin meningkat pesat. Kondisi ini disebabkan karena hampir semua kebijakan Residen lebih diarahkan untuk kepentingan

² Setelah tahun 1913, Residen Bangka bertugas untuk mengelola pemerintahan, bertempat di Pangkal Pinang, sementara urusan pertimahan dipegang oleh seorang Kepala Tambang yang berkedudukan di Mentok. Untuk diskusi panjang lebar mengenai pengelolaan tata pemerintahan di Bangka lihat Erwiza Erman (2009: 19-37).

perusahaan tambang daripada untuk kepentingan sosial-ekonomi penduduk Bangka (Erwiza Erman 2009:19-37). Itulah sebabnya, ketika desentralisasi kekuasaan diperkenalkan pada awal abad ke-20, ketidakseimbangan antara pembangunan penduduk Bangka dan pertambangan menjadi tema perbincangan di kalangan pejabat pemerintahan di pusat, Batavia. Dalam kaitan inilah, Residen Belanda di Bangka, W.J. Coenen, mengeluh situasi dilematis kepada atasannya di Batavia atas fungsinya yang mendua. Ia mengatakan bahwa ia telah dihadapkan pada tugas yang lebih menyita waktu untuk mengelola perusahaan negara daripada mengurus kepentingan penduduk Bangka. Inilah suatu tugas berat yang diembannya yang berbeda dari para koleganya di berbagai daerah lain di Hindia-Belanda. Dalam laporan pertimbangannya yang panjang lebar kepada atasannya di Batavia, Coenen menjelaskan bahwa penduduk Bangka kini hidup ‘setengah paria’, miskin, terkebelakang pada hampir semua bidang kehidupan dan ironis di tengah sumberdaya timahnya yang kaya.

Bagi masyarakat Bangka, kontrol pemerintah Belanda terhadap sumberdaya alamnya betul-betul mempersempit dan bahkan menutup akses mereka untuk menambang timah, meskipun di tanahnya sendiri. Jika tanah-tanah penduduk mengandung timah, pemerintah Belanda akan memberikan ganti rugi tanah termasuk semua jenis tanaman penduduk. Masyarakat hanya memiliki akses menambang timah di daerah pembuangan yang disebut *tailing* dan di daerah yang dianggap tidak lagi efisien oleh perusahaan tambang. Wilayah-wilayah yang tidak efisien menurut pertimbangan perusahaan diserahkan penambangannya kepada pihak swasta, disebut ‘*supplier* swasta’ pada masa kolonial atau Tambang Kontrak Karya (TKK) pada masa Orde Baru (1980an). Walaupun demikian, timah yang diproduksi oleh kelompok ini juga tidak memiliki akses untuk memasarkan timahnya sendiri, karena harus menjualnya ke perusahaan timah. Sampai era Reformasi, masyarakat Bangka tidak diizinkan untuk menambang, sekalipun, di tanahnya sendiri, dan itu berarti tertutup pintu untuk mengakses timah sebagai sumber mata pencaharian mereka. Karena itu, sampai tahun 1980an, penduduk setempat pada umumnya tetap bekerja sebagai petani khususnya petani lada dan karet dan sedikit jumlah mereka yang

bekerja sebagai buruh atau tenaga kerja di perusahaan timah sampai tahun 1980an³.

Implikasi dari sistem kontrol yang disentralisir dan dimonopoli dari dan oleh pemerintah pusat telah mengindikasikan pentingnya timah untuk sumber pendapatan negara di satu pihak. Di lain pihak, di Bangka, muncul perkembangan sosial-ekonomi yang dualistis. Wilayah utara adalah wilayah eksploitasi timah, berpenduduk lebih padat dari pada wilayah Selatan, dan rasio perbandingan etnik Cina sebagai penambang dengan penduduk Bangka hampir sama. Daerah-daerah mereka adalah Jebus, Sungailiat dan Pangkal Pinang yang merupakan kota dengan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang jauh lebih baik dari daerah Selatan yang dibangun untuk kepentingan masyarakat dan perusahaan tambang. Sementara di daerah bagian Selatan Bangka, yaitu Toboali dan sekitarnya disebut daerah 'kampung' untuk pertanian lada dan karet. Daerah ini dihuni mayoritas orang Bangka dengan tingkat kepadatan yang jarang (Somers Heidhuis 1992: 231).

Sampai berakhirnya pemerintahan Suharto, hampir tidak ada perubahan yang berarti dalam hal sistem kontrol terhadap penambangan timah. PN/PT Timah Tbk dan kemudian PT Koba Tin yang didirikan pada akhir tahun 1970-an melalui perjanjian Kontrak Karya dengan PT Timah merupakan dua perusahaan yang memonopoli seluruh wilayah eksploitasi timah Bangka seluas 360.000 ha atau 35% dari total luas pulau itu. Selama periode Orde Baru, diberlakukan kebijaksanaan yang sama dengan pemerintah kolonial Belanda, yakni mengawasi wilayah operasi penambangan dengan proteksi militer.

Perubahan yang dramatis dalam kontrol atas sumberdaya timah terjadi setelah era Reformasi. Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan keputusan yang tidak lagi mencantumkan kata 'timah' dalam daftar barang-barang ekspor yang diawasi atau diatur pemerintah⁴. Keputusan ini berimplikasi bahwa siapapun dapat memasarkan timah.

³ Sampai tahun 1950an, mayoritas penambang adalah orang-orang Cina. Setelah itu, banyak dari mereka kembali ke Cina atau ke tempat-tempat lain. Posisi mereka digantikan oleh orang Jawa, Batak, Minangkabau, Timor dan Ambon. Selain tingkat pendidikan penduduk Bangka yang relatif rendah, mereka menganggap tidak cocok pekerjaan dengan sistem kontrak atau sebagai orang 'gajian'. Kondisi ini bukanlah tipikal penduduk Bangka, akan tetapi juga ditemukan pada masyarakat lain yang berada di luar pulau Jawa, di mana pada umumnya mereka masih memiliki akses yang luas terhadap tanah pertanian.

⁴ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan no. 146/MPP/Keop/4/Tahun 1999.

Perubahan sistem kontrol dalam perdagangan timah ini terjadi pada saat Indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi dan krisis keuangan 1998 yang berlarut-larut dan pada saat harga timah mencapai 7.000 dollar per metrik ton, suatu harga yang relatif tinggi dan menguntungkan, disertai dengan nilai tukar rupiah yang masih tinggi. Indonesia merupakan negara yang memproduksi 25% dari total kebutuhan timah internasional (200,000 ton) pertahun dan sebagian besar berasal dari timah Bangka, tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu (<http://www.timah.com/pt-tambang-timah/scope.htm>). Timah yang merupakan komoditi tambang yang dipasarkan dalam bentuk dollar Amerika, jelas akan memberi keuntungan yang luar biasa bagi perusahaan yang mengelolanya.

Keputusan Menteri Perindustri dan Perdagangan tersebut diinterpretasikan oleh berbagai pihak; pebisnis, pemerintah daerah dan masyarakat Bangka sebagai awal dari era baru pertimahan dan awal dari lepasnya kontrol pemerintah pada semua tataran; mulai dari proses produksi sampai ke pemasaran. Semangat otonomi daerah telah menjiwai keinginan daerah untuk menikmati keuntungan sumber daya alamnya seperti waktu Bangka di bawah Kesultanan Palembang. Keputusan tersebut telah membuat setiap orang merasa berhak untuk mengambil, memiliki dan bahkan menjual timah, suatu kegiatan yang dilarang sejak tahun 1819 sampai 1999⁵. Keputusan Menteri Perindustri dan Perdagangan tersebut ditanggapi oleh Bupati Bangka, Eko Maulana Ali dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) no.6 tahun 2001 yang pada dasarnya memberi akses kepada masyarakat Bangka untuk menambang. Menurutnya, pemerintah daerah berhak memberi izin penambangan kepada masyarakat untuk menambang. Perda ini ditanggapi oleh pemerintah propinsi Bangka dan pemerintah pusat dengan menggunakan isu degradasi lingkungan yang parah sebagai akibat penambangan timah oleh masyarakat dan pebisnis, lokal dan luar Bangka. Sampai tahun 2004 saja, ada 23 perusahaan timah

⁵ Patut diketahui bahwa selama pemerintahan Orde Baru, banyak orang Bangka dipenjarakan, karena menambang dan menyimpan timah, meskipun hanya satu kilogram saja dan yang membawa timah ke luar Bangka secara gelap.

atas nama pebisnis lokal yang melakukan penambangan dan pencairan timah, selain dari PT Timah Bangka Tbk dan PT.Koba Tin⁶.

Kontrol pemerintah yang lepas adalah awal masuknya era liberalisasi penambangan yang beriring sejalan dengan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Kondisi ini membawa dampak pada keragaman dalam eksploitasi penambangan timah. Selain dua perusahaan besar tersebut di atas, pemerintah daerah juga mulai terjun dalam bisnis pertimahan dengan mendirikan Perusahaan Daerah (Perusda), disertai 23 perusahaan timah lokal yang mendapat izin penambangan dari pemerintah daerah serta munculnya apa yang disebut Tambang Inkvensional (TI) yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau penduduk yang datang dari luar Bangka (Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2004)⁷. Liberalisasi dalam sektor penambangan timah ini pada dasarnya memberikan keuntungan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk redistribusi, pajak dan royalti. Misalnya, jumlah pajak yang diterima Kabupaten Bangka antara bulan September 2001 sampai Februari 2002 saja, mencapai dua milyar rupiah (*Kompas* 4 April 2002).

Liberalisasi penambangan timah di era otonomi daerah telah membuka akses lebar kepada berbagai kelompok masyarakat, baik pemilik modal, *supplier* alat-alat penambangan, bahan bakar, penjual makanan, penyedia hiburan, dan para penambang dari dan luar Bangka untuk bersama-sama memperoleh keuntungan langsung atau pun tidak langsung dengan bisnis tersebut. Kelompok investor didominasi oleh etnik Cina dari dalam dan luar Bangka, dari Singapura, Malaysia dan bahkan dari Cina. Sebagian investor tersebut ‘*hidden*’, karena nama-nama mereka tidak ditemukan dalam daftar manejer perusahaan. Mereka bertindak sebagai ”manajer bayangan” (*shadow manager*). Untuk menjalankan perusahaan dipakai orang-orang lokal Bangka yang memainkan peranan penting dalam mengontrol bisnis dan menghadapi bi-

⁶ Perusahaan-perusahaan timah baru di Bangka adalah sebagai berikut: Andika Tri Utama, PT. KIMora Indah Lestari, CV. Dandi Jaya, PT. Crow's Supreme Sakti, CV. Nian Sehati Jaya, PT. Lembawai Trinindo Sejati, PT. Asarindo Pritia Karya, PT. Surya Raya Sejahtera Sentosa, PD. Bone Jaya, Putra CV.Daya, CV. Efdaka, PT. Minindo Karya Lestari, CV. Jababel, PD. Bangka Global Mandiri, CV. Makmur Abadi, CV. Makmur Abadi, CV. Current Lestar Jaya, CV. Jaya Kencana, Widya CV.Artha Dama, CV. Savannah, Sakti, CV. Basuki, CV. Bina Mulia Jaya.

⁷*Daftar Eksportir/Importer dan Realisasi Ekspor dan Impor*. 2004. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, propinsi Bangka Belitung tahun 2004.

rokrat. Sejak 2005, beberapa investor berhasil dalam memproduksi pasir timah, membeli pasir timah dari penambang TI dan kadang-kadang juga menyuplai peralatan alat berat kepada penambang.

Jumlah TI yang beroperasi sulit untuk diketahui secara pasti. Sebab wilayah operasi mereka berpindah-pindah. Hanya perhitungan kasar bisa diperoleh. Pada tahun 2001 terdapat 1.320 pengusaha TI dengan 4.671 pemilik TI secara individu yang bertebaran di daratan dan perairan Bangka (*Kompas*. 18 Desember 2001). Awal 2001, jumlahnya meningkat 400% dari tahun sebelumnya. Menurut data yang diperoleh dari Asosiasi Penambangan Rakyat (ASTIRA) jumlah TI yang terdaftar sampai Mei 2005 adalah 14.345 unit, sementara jika dibuat perhitungan kasar menurut Ketua Astira, adalah sekitar 18.000 unit TI. Perhitungan ini dibuat atas perkiraan penjualan mesin semprot yang diimpor dari Cina yang telah membuka cabang usahanya sampai ke ibukota kabupaten dan kecamatan (*Kompas* 18 Desember 2001). Wilayah operasi mereka sebagian besar di daerah kuasa penambangan PT.Timah yang tidak lagi dikerjakan (72%), di wilayah yang sudah direklamasi oleh PT Timah Bangka Tbk dan PT Koba Tin (16%) dan di luar area penambangan timah dan daerah-daerah lain (2%) (Zulkarnain 2006: 99).

Hilangnya kontrol dan liberalisasi dalam sistem penambangan timah Bangka ini telah berakibat negatif pada dua perusahaan lama, PT.Timah Bangka Tbk dan PT.Koba Tin. Produksi timah TI unggul dan ini terbukti dari 27.000 ton pasir timah yang dikeluarkan oleh PT.Timah Bangka, hanya 3.000 ton yang diproduksinya, sementara 24.000 ton dibeli dari penambang TI. Kondisi yang sama juga ditemukan di PT Koba Tin, di mana 80% dari produksi pasir timah berasal dari TI yang berpatner dengan PT.Koba Tin. Bentuk operasi penambangan sangat rakus, berorientasi pada keuntungan jangka pendek dan berakibat pada kritisnya lingkungan.

PENAMBANGAN TIMAH SEBAGAI 'DATUK' PERUSAK BUMI

Datuk adalah bahasa Melayu, gelar kepada pemimpin adat di kebudayaan Melayu Bangka, dihormati dan tempat bertanya oleh masyarakat setempat. Pada masa parahnya lingkungan Bangka, istilah Datuk ini kemudian dihubungkan dengan timah. Istilah "Datuk Perusak Bumi," adalah istilah yang diberikan oleh orang Bangka sendiri untuk

merujuk ke penambangan timah yang tidak terkontrol yang telah membawa degradasi lingkungan yang sangat kritis. Istilah ini muncul ketika kontroversi antara kelompok pro dan kontra TI sedang mencapai titik kulminasinya. Daerah pertambangan lainnya di Indonesia juga mengalami nasib yang sama karena adanya penambangan liar, namun perdebatan dan kontroversi kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan TI di Bangka intens, melibatkan berbagai aktor dan berlarut-larut sampai kemudian terpilihnya Bupati Bangka Induk menjadi Gubernur Kedua di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perubahan lanskap Bangka dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan timah, bukan masalah baru. Setidaknya, masalah ini telah dilaporkan sejak pertengahan abad ke-19 oleh seorang dokter Jerman, Franz Epp (1852) yang bertugas di Bangka. Kemudian, diikuti oleh laporan J.A. Schuurman (1898), dan Karl Helbig (1940), seorang ahli geografi Jerman yang hidup dalam zaman berbeda, dengan sinis melaporkan bahwa "Bangka memiliki banyak sungai tetapi kekurangan air bersih". Selanjutnya Schuurman menjelaskan bahwa "tidak ada pulau di Nusantara yang telah mengalami perubahan topografi yang luar biasa akibat eksploitasi penambangan timah yang telah mengupas tanah secara meluas, telah menggundulkan hutan yang berlangsung beratus tahun, semuanya dikerjakan oleh buruh Cina yang diimpor dari negerinya" (Somers Heidhuis 1992:231). Kekurangan air bersih yang ditemukan Epp dan Schuurman masih ditemukan pada abad 21. Data tahun 2009 menunjukkan bahwa hanya 43% rumah tangga di Bangka dan Belitung yang memiliki akses terhadap air bersih. Dari jumlah itu, 7% dari mereka adalah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum.

Perubahan lanskap Bangka semakin mencolok dengan sifat penambangan TI yang rakus, tidak terkendali, berorientasi pada keuntungan jangka pendek dan tidak melakukan reklamasi. Bahkan wilayah operasi mereka merambah ke kawasan wisata pantai, tempat-tempat bersejarah, daerah pemukiman, lahan pertanian dan perkebunan, hutan lindung, jalur hijau, kawasan konservasi, kuburan, dan berbagai fasilitas umum (sekolah-sekolah, jalan, jembatan) serta wilayah tangkapan nelayan. Daerah ini sebenarnya telah berubah menjadi daerah operasi TI dan telah menciptakan kolam-kolam besar yang menurut istilah di Bangka disebut *kolong*. Sayangnya belum ada penelitian yang menunjukkan

sejauh mana perubahan lanskap hadir dengan kehadiran *kolong-kolong* baru. Menurut hasil penelitian Universitas Sriwijaya tahun 1998/1999, PT.Timah Bangka tbk sendiri telah meninggalkan 887 kolong dengan luas 1,712.65 hektar, dan PT Koba Tin memiliki 104 kolong. Dari 887 kolong, 544 darinya atau seluas 1.035,51 hektar ada di Pulau Bangka, sedangkan sisanya dari 343 atas 677,14 hektar di Pulau Belitung. Hanya 162 kolong yang direklamasi;108 terdapat di Bangka, dan 54 di Belitung. Kolong-kolong itu juga dapat membawa penyakit malaria. Hal ini didukung oleh bukti sekitar 11,2 persen penderita malaria di Indonesia berasal dari provinsi Bangka-Belitung Kepulauan (Joko Susilo dan Siti Maimunah 2009: 93).

Sebenarnya, ada banyak kasus perubahan pemanfaatan lahan sebagai konsekuensi yang tidak diinginkan dari penambangan TI, namun karena ruang yang terbatas tidak dijelaskan di dalam artikel ini. Kegiatan penambangan TI merambah pemukiman penduduk di desa, kota, fasilitas umum, kebun lada, kelapa sawit, dan wilayah-wilayah yang terletak di sepanjang pantai. Sebagai contoh, kawasan pesisir untuk daerah wisata yang terletak di Klabat dan Jebus pada bulan April dan Mei 2005 telah berubah menjadi lahan potensial untuk pengoperasian 1.000 TI Apung yang berasal dari berbagai daerah Bangka. Kawasan itu tidak lagi dapat dikembangkan untuk wisata karena rusaknya pantai. Kawasan hutan lindung juga ditambang oleh penambang TI. Hasil penggalian telah meninggalkan *kolong* yang dalamnya mencapai dua sampai sepuluh meter . Selanjutnya, pulau Lepar yang termasuk sebagai kawasan konservasi di Kabupaten Bangka Selatan, hutan lindung di gunung Mangkol, Kabupaten Bangka Tengah, dan hutan lindung di Bangka Utara telah ditambang secara acak oleh penambang TI, belum lagi perkebunan kelapa sawit, lada dan sawah-sawah yang sudah menjadi ”kebun timah”.

Selain perubahan lanskap, degradasi lingkungan yang disebabkan oleh TI tidak bisa dihindari. Maraknya tingkat kerusakan lingkungan disebabkan oleh penjarahan serakah di berbagai tempat di sekitar Bangka dan di wilayah yang sudah direklamasi oleh PT Timah Bangka tbk. Kerusakan lingkungan sudah sampai pada titik kritis, di mana pada tahun 2004 terdapat sekitar 30% kerusakan parah hutan di Bangka dan 5% darinya sebagai akibat dari kegiatan TI (<http://www.terranel.or.id/>

beritanya.php.id). Pada tahun 2008, luas lahan kritis di Bangka telah mencapai 1.642.414 hektar⁸. Masalahnya bukan tentang ukuran luas lahan atau persentase lahan rusak, namun bahaya nyata adalah kerusakan lingkungan yang semakin tinggi intensitasnya dan sudah sampai pada tahap kritis. Hutan yang terdegradasi telah diperparah oleh air sungai yang tercemar. Ada sebelas sungai besar tercemar dan telah berubah warnanya menjadi kopi susu⁹. Ini belum termasuk wilayah rambahan TI yang sampai merusak Perusahaan Daerah Air Minum di Pangkal Pinang dan kota Toboali. Pendeknya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang baru dibentuk pada November 2000 dalam waktu singkat telah menjadi provinsi “Babak Belur (Babel)”. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana reaksi dari pemangku kepentingan, seperti pemerintah, perusahaan pertambangan besar, dan masyarakat lokal untuk kondisi lingkungan yang parah itu? Mengapa persoalan degradasi lingkungan menjadi kontroversi di berbagai pemangku kepentingan di Bangka? Bagian selanjutnya akan melihat respon yang berbeda dari aktor pemerintah dan masyarakat lokal dalam melihat kerusakan lingkungan itu. Dari situ akan terlihat persoalan tambang, dan resisten atau tidaknya para aktor terhadap kerusakan lingkungan harus dilihat dalam konteks persaingan kepentingan ekonomi politik pada tingkat yang lebih luas.

AKTOR, AKSES DAN POLITIK LINGKUNGAN

Debat-debat yang menghubungkan persoalan penambangan TI dengan kerusakan lingkungan di Bangka oleh para aktor (pemerintah, pengusaha dan masyarakat) tampaknya harus dipahami sebagai konflik sosial-ekonomi dan politik untuk tingkat yang lebih luas. Untuk itu, diperlukan sebuah *review* yang cermat dan jeli melihat latarbelakang aktor, motivasi, dan akses mereka terhadap sumberdaya timah baik langsung ataupun tidak. Dalam debat-debat yang menghubungkan penambangan timah dengan kerusakan lingkungan muncul sikap politik yang berbeda antara politik protes dan akomodatif terhadap bentuk-

⁸ *Metro Babel*. “Pemanfaatan Kolong Eks Tambang Belum Serius.” 52/tahun Edisi II / 18, 24 September 2008.

⁹ Sebelas sungai itu adalah: Rangkui (Pangkal Pinang), Baturusa (Bangka Induk), Kampak (Bangka Barat), Mancung (Bangka Barat), Muntok (Bangka Barat), Jering (Bangka Barat), Gusung (Bangka Selatan), Jeruk (Bangka Induk), Kurau (Bangka Induk), Pedindang (Bangka Tengah), Kepak (Bangka Selatan). Lihat Joko Susilo dan Siti Maimunah. *Tiga Abad Melayani Dunia*....2009: 93.

bentuk penambangan baik oleh TI, PT Timah Bangka Tbk, PT Koba Tin dan perusahaan-perusahaan timah yang muncul setelah era Reformasi. Politik protes atau akomodatif itu dapat dilihat dari seberapa jauh aktor-aktor tersebut mendapatkan akses atau kehilangan akses sumber-sumber ekonomi dan politik mereka. Karena itu, tidak heran jika ada keberagaman sikap politik para aktor terhadap kerusakan lingkungan akibat penambangan. Uraian di bawah ini akan menjelaskan peran aktor dan perjuangan untuk mendapatkan akses yang mereka dapatkan dari penambangan dan politik mereka terhadap kerusakan lingkungan.

Aktor Pemerintah

Pemerintah bukanlah aktor yang homogen baik dari pusat, provinsi, kabupaten dan bahkan ke tingkat kecamatan dalam konteks merespon dampak lingkungan akibat penambangan. Pertanyaannya adalah, mengapa pemerintah cenderung membiarkan kerusakan lingkungan yang berkepanjangan di Pulau Bangka. Mengapa isu-isu kerusakan lingkungan dan protes penduduk yang terkena bencana tidak mendapatkan solusi yang komprehensif dari pemerintah? Seolah-olah persoalan kerusakan lingkungan bagai ‘benang kusut’ yang tidak bisa diselesaikan. Mengapa baru pada tahun 2007, setelah Bupati Bangka menjadi Gubernur, dibentuk gerakan sosial hijau yang dikenal dengan nama Babel Hijau Lestari, perdebatan mengenai kerusakan lingkungan semakin menurun intensitasnya dan pemberitaan kerusakan lingkungan Bangka di media massa semakin menghilang. Apakah persoalan lingkungan berarti sudah teratasi?

Berbagai pendapat aktor-aktor dalam institusi pemerintah mengenai masalah penambangan dan kerusakan lingkungan, di satu pihak bertolak dari ‘kegamangan’ pemerintah pusat melepaskan atau memberikan kuasanya kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan di sektor pertambangan. Dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Departemen Sumberdaya Mineral dan Energi, khususnya Dirjen Pertambangan Umum dan Mineral yang membawahi PT.Timah Tbk. Di pihak lain, adanya tuntutan pemerintah daerah untuk memiliki akses dalam mengelola sektor pertambangan. Perjuangan untuk mendapatkan otonomi daerah dan sekaligus keuntungan dari sumberdaya timahnya yang melimpah untuk pembangunan daerah, dimulai sejak pertengahan abad ke-19 (1850), awal abad ke-20, pada akhir 1950-an, 1970-an

dan 1980-an, dan baru berhasil ketika era reformasi¹⁰. Masa antara tahun 2000 sampai 2007 adalah masa yang penuh kontroversi dalam memandang tambang dan persoalan lingkungan yang diakibatkan olehnya antar institusi dan di dalam berbagai institusi pemerintah pusat. Uraian di bawah ini akan menjelaskan perjuangan pemerintah daerah untuk mengelola daerah dan sumberdaya timahnya.

Timah dari masa VOC sampai kini merupakan sumber pendapatan terpenting di Pulau Bangka. Walaupun demikian, pemerintah Bangka tidak menikmati keuntungan tersebut. Pembangunan Bangka jauh tertinggal. Karena itu, perjuangan untuk mendapatkan keuntungan dari industri pertimahan sudah mulai kembali digalakkan ketika Indonesia memasuki era Reformasi. Pada awalnya, perjuangan itu diawali dengan permintaan saham 15% yang kemudian meningkat menjadi 25% dari PT.Timah Tbk yang dipelopori oleh Bupati Bangka, Eko Maulana Ali. (Wawancara dengan JM Juni 2001). Permintaan itu didasari alasan bahwa selama ini keuntungan dari eksploitasi penambangan timah lebih banyak mengalir ke pemerintah pusat (Jakarta) dan ke provinsi Sumatera Selatan (Palembang) daripada untuk daerah Bangka sendiri. Perjuangan untuk mendapatkan akses dalam pemilikan saham ini diikuti pula dengan tuntutan pemerintah daerah yang diikuti dengan Kongres Rakyat Bangka Belitung untuk menggantikan posisi direktur PT.Timah Tbk dengan putra daerah. Tuntutan-tuntutan ini merupakan gejala umum yang terjadi di banyak daerah kaya yang selama ini lebih berfungsi hanya sebagai 'penyuplai' keuntungan dari sumberdaya alam mereka yang melimpah untuk pemerintah pusat. Khusus untuk Bangka-Belitung, perjuangan untuk mendapatkan akses dalam bisnis pertimahan itu pada saat yang sama juga disertai perjuangan untuk membentuk provinsi sendiri, lepas dari induknya, Sumatera Selatan.

Tuntutan-tuntutan tersebut disertai dengan muncul dan maraknya penambangan TI yang merusak lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat Bangka yang oleh banyak pemimpin Bangka dianggap sebagai protes terhadap keuntungan yang didominasi pemerintah pusat lewat kedua perusahaan timah berskala besar, PT.Timah Bangka Tbk

¹⁰ Perjuangan akhirnya berhasil ketika Indonesia memasuki Era Reformasi. Provinsi kepulauan Bangka Belitung dibentuk pada bulan November 2000, dan kemudian diikuti dengan perluasan dari dua kabupaten menjadi enam kabupaten di awal tahun 2002. Provinsi ini terdiri dari 6 Kabupaten, yaitu Bangka Induk, Bangka Barat, Bangka Tengah dan Bangka Selatan; Kabupaten Belitung dan Belitung Timur dan satu kota, Pangkal Pinang.

dan PT Koba Tin. Serbuan ke lokasi penambangan di kedua perusahaan tersebut oleh para penambang TI tidak dapat dibendung. Munculnya operasi TI dan kemudian 23 perusahaan tambang baru telah menjadi kompetitor PT Timah dan PT Koba Tin.

Tuntutan memperoleh saham dan penggantian posisi direktur perusahaan dengan putra Bangka membawa diskusi hangat dan berlarut-larut antara pemerintah pusat, PT.Timah Bangka Tbk dengan pemerintah kabupaten Bangka. Akan tetapi upaya untuk mendapatkan pemilikan saham tidak berhasil, karena Departemen Sumberdaya Daya Energi dan Mineral yang membawahi PT.Timah Bangka Tbk meragukan kemampuan pemerintah daerah dalam bisnis pertimahan. Walaupun demikian, upaya untuk menggantikan posisi Direktur eksekutif perusahaan, Erryana Pamungkas, seorang Jawa, dengan Tobrani Alwi, putra Bangka, berhasil setelah didahului oleh demonstrasi yang dilakukan oleh Kongres Rakyat Bangka.

Sebagian tuntutan dari pemerintah daerah memang tidak berhasil, bukan berarti bahwa perjuangan untuk memperoleh keuntungan dari penambangan timah tidak dilanjutkan. Bupati Bangka kemudian menggunakan kekuasaannya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah no.146/2001. Peraturan Daerah ini telah memberikan banyak akses kepada penduduk dan berbagai pengusaha untuk berpartisipasi dalam bisnis timah, baik dalam bentuk eksploitasi pertambangan, peleburan timah, dan ekspor pasir timah.

Kebijakan Bupati telah mengakibatkan kontroversi berkepanjangan antara Bupati dan Walikota Pangkal Pinang¹¹ dengan Gubernur Provinsi Bangka-Belitung dan pemerintah pusat. Dalam kontroversi itu, masalah penambangan TI, degradasi lingkungan dan perdagangan ilegal pasir timah digunakan oleh Gubernur dan Departemen Dalam Negeri, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memprotes kebijakan Bupati dan mencabut izin ekspor pasir timah oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Usaha itu berhasil. Lisensi ekspor dicabut pada bulan April 2002, dan pengawasan perdagangan timah diawasi kembali. Menurut pemerintah pusat, pengawasan ini

¹¹ Walikota Pangkal Pinang berada pada pihak yang sama dengan Bupati. Sebab ia kemudian mengeluarkan izin kepada para pengusaha pertimahan untuk mendirikan perusahaan eksploitasi dan peleburan timah di kota Pangkal Pinang. (Wawancara dengan birokrat di Pangkal Pinang Desember 2004).

diharapkan dapat menurunkan intensitas penambangan TI yang marak dan kerusakan lingkungan. Namun, Bupati kemudian mencari celah lain dengan mengeluarkan Keputusan Surat Izin Perdagangan Antar Daerah (SIPAD) pada bulan Juli 2003. Keputusan ini memberikan akses kepada perusahaan eksportir untuk membawa pasir timah dari Bangka untuk dicairkan ke berbagai perusahaan peleburan di luar Bangka¹². Selain SIPAD, pemerintah kabupaten dan kota memberikan izin bagi pengusaha untuk mendirikan perusahaan peleburan, dengan alasan mengurangi penyelundupan dan mengakomodasi penambang TI. Kebijakan ini juga memperoleh tantangan yang sama dari pemerintah provinsi dan pusat yang berpegang pada undang-undang pertambangan 1967 yang masih diberlakukan.

Pada dasarnya di balik kontroversi dalam penambangan TI dan degradasi lingkungan ada persaingan politik dan ekonomi antaraktor pemerintah. Persaingan politik dan ekonomi itu dapat ditelusuri dari proses pencalonan gubernur untuk provinsi yang baru didirikan di Kepulauan Bangka Belitung. Bupati Bangka adalah orang pertama yang sering disebut ‘pemain lama’, dari PDI-Perjuangan, yang ikut berjuang membangun Provinsi Kep. Bangka-Belitung, telah memberi kesempatan kepada masyarakat Bangka untuk menambang dengan munculnya TI dan perusahaan-perusahaan tambang yang baru. Sebaliknya, pemain baru yang kemudian terpilih sebagai gubernur, adalah ‘pendatang baru’ dalam birokrasi pemerintahan, tetapi lebih berpengalaman dalam bidang politik. Ia ketua DPD Golkar Bangka-Belitung, dan meniti karir sebagai karyawan di PT Timah Tbk, kontra terhadap aktivitas penambangan TI. Kompetisi untuk mendapatkan akses politik adalah mirip dengan persaingan untuk mendapatkan akses ekonomi antara perusahaan-perusahaan yang baru dibentuk dengan PT Timah Bangka Tbk dan PT Koba Tin. Persaingan antara dua aktor juga

¹² Surat Izin Perdagangan Antar Daerah ini telah dimanipulasi oleh berbagai perusahaan timah baru untuk membawa pasir timah untuk dicairkan di luar Bangka dan baru kemudian diekspor. Sebab pemerintah melarang ekspor dalam bentuk pasir timah. Dari beberapa kasus tertangkapnya kapal-kapal pengangkut pasir timah itu keluar Bangka, diketahui bahwa pencarian timah Bangka di Jakarta dan Surabaya sebenarnya ‘tidak ada’ dan ini adalah salah satu cara untuk memperdagangkan pasir timah ilegal ke Singapura dan Malaysia. Ada penampung pasir timah di kedua negara ini, dan bahkan seorang penampung pasir timah ilegal dari Bangka adalah seorang yang memiliki hubungan keluarga yang tinggal di Bangka dan berpengalaman lama menampung komoditi selundupan dari Indonesia. Informasi ini diperoleh dari wawancara dengan wartawan Bangka Pos yang menelusuri jaringan perdagangan gelap pasir timah ke Malaysia.

persaingan antara Partai Golkar yang mendukung pelaku ‘pendatang baru’ dan PDIP yang membawa ‘pemain lama’. Di tengah kompetisi itulah, masing-masing sekutu dari pemain lama dan pemain baru dalam pentas pencalonan gubernur Bangka tarik menarik dan tuduh-menuduh mengenai eksploitasi penambangan dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh penambangan TI dan perusahaan tambang baru dengan penambangan dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh kedua perusahaan lama. Namun demikian, aktor yang bertindak sebagai ‘pendatang baru’ telah memenangkan kursi gubernur karena didukung oleh Golkar, partai yang berkuasa selama rezim Orde Baru yang telah dua kali memenangkan Pemilihan Umum di Pulau Bangka.

Debat mengenai penambangan TI dan kerusakan lingkungan antar aktor dan sekutunya yang mendukung Golkar atau PDIP, muncul dalam sidang-sidang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I. Ada beberapa contoh yang dapat dilihat dalam berbagai debat tersebut. Misalnya, tuduhan dari lawan Bupati datang dari anggota fraksi Golkar dan PPP. Dalam pertemuan di DPRD Tkt I, ada upaya menyudutkan Bupati Bangka oleh Partai Golkar yang diwakili oleh Mustadja Santoso (Golkar), dan Taufik Rani. Kedua tokoh politik ini adalah mitra dengan PT.Timah Bangka Tbk yang mengelola Tambang Kontrak Karya. Mereka mengatakan bahwa SIPAD Bupati digunakan sebagai alasan untuk meningkatkan produksi timah TI, dan penyelundupan pasir timah oleh berbagai pengusaha lokal ke luar Bangka. Penyelundupan pasir timah ini disebabkan karena perbedaan harga yang mencolok antara harga pasir timah yang ditetapkan oleh kedua perusahaan besar dengan harga yang berlaku di pasar bebas.(Wawancara dengan HL, Juni 2005) Pada gilirannya, kondisi ini membawa akibat yang fatal terhadap lingkungan di Bangka. Sementara itu, pendukung Bupati dan SIPAD yang bekerja di kantor Perindustri dan Perdagangan Kabupaten Bangka juga menangkis tuduhan bahwa masalah penyelundupan timah sudah lama dan lumrah terjadi di Bangka, jauh sebelum SIPAD Bupati dikeluarkan, bahkan bisa ditelusuri sampai ke masa VOC yang memonopoli perdagangan timah melalui kontrak dagang dengan Sultan

Palembang. Pada dasarnya melalui SIPAD ini, pemerintah kabupaten Bangka telah memperoleh penghasilan besar dari bisnis ini¹³.

Pro kontra mengenai TI, kerusakan lingkungan dan perdagangan pasir timah antara Bupati dan pendukungnya dengan Gubernur dan pendukungnya, telah diatasi seiring dengan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh provinsi. Pada awal tahun 2004, Gubernur mengambil alih posisi untuk mengontrol masalah penambangan TI yang merusak lingkungan. Bersamaan dengan selesainya masalah pemekaran kabupaten. Namun, dalam praktiknya, penegakkan hukum sulit dijalankan, karena ada aktor di berbagai instansi pemerintah yang melakukan tindakan-tindakan ilegal, berkolaborasi dengan penambang TI dan bahkan mengizinkan wilayah penambangan di daerah-daerah hutan lindung atau di wilayah-wilayah terlarang. Sikap kolaboratif ini sebetulnya beranjak dari adanya keuntungan yang diterima oleh aktor-aktor di instansi pemerintahan sampai ke tingkat desa baik langsung maupun tidak langsung dari penambangan TI itu. Oleh karena itu, tidak mengherankan, jika mekanisme kontrol pemerintah provinsi melalui aparat kepolisian bagai sebuah 'permainan'. Ketika polisi mengontrol penambangan TI yang memakai alat-alat berat atau menambang di daerah terlarang, wilayah-wilayah penambangan itu tampak bersih. Polisi gagal menemukan bukti. Peralatan tambang tidak ditemukan dan wilayah tambang sepi. Akan tetapi, ketika polisi kembali ke baraknya, maka aktivitas penambangan kembali marak. Kondisi semacam ini berkali-kali terjadi. Hambatan gagalnya kontrol bersumber dari keterbatasan dana para aparat penegak hukum dan bahkan sebagian mereka juga ikut mendapatkan keuntungan dari aktivitas penambangan tersebut (*Bangka Pos* 13-11-2004).

Persaingan antara Gubernur dan Bupati dalam pengelolaan timah sebagai sumber daya alam yang berharga terus-menerus terjadi dan bahkan telah diintervensi oleh institusi kepolisian dari Jakarta. Terjadilah peristiwa "Oktober 2006", di mana pada awal Oktober 2006,

¹³ Ada empat perusahaan timah yang memiliki SIPAD, yaitu CV Bayu Pratama Mandiri, CV Basuki, PT.Kranji Jaya Utama Jaya and CV Donna Kembara Jaya. Dari empat perusahaan ini, CV Bayu Pratama Mandiri memberikan kontribusi terbesar 323, 500,000 rupiah untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka. Sementara itu, Kabupaten Bangka ini juga telah menerima 9 milyar rupiah dari bulan Januari sampai September 2001 dari penambangan TI. Jumlah ini jauh lebih besar daripada kontribusi PT.Tambang Timah Tbk kepada Bangka yang hanya tiga milyar pertahun. Lihat *Bangka Pos*, 16-12-2003; 16-9-2003.

polisi menangkap enam manajer dari perusahaan dan peleburan timah yang dianggap telah merusak lingkungan dan merugikan negara, karena menyelundupkan pasir timah ke luar negeri, terutama ke Singapura dan Malaysia. Mereka ditahan di Pangkal Pinang dan kemudian dibawa ke Jakarta, tetapi beberapa bulan kemudian dibebaskan tanpa proses hukum yang jelas¹⁴. Penahanan enam manajer perusahaan tersebut telah membawa dampak pada terhentinya aktivitas TI, lesunya pasar, dan kerugian bagi para penambangnya. Akibat selanjutnya adalah para penambang TI menyerbu kantor Gubernur dan merusak berbagai peralatan. Bangka dinyatakan dalam keadaan darurat. Masyarakat Bangka menyebut peristiwa sejarah kelam di provinsi baru, karena itu disebut dengan “Oktober kelabu”. Peristiwa ini terjadi beberapa bulan sebelum Pilkada Gubernur Bangka-Belitung diadakan.

Di satu sisi, peristiwa Oktober kelabu telah menurunkan popularitas gubernur, karena orang menganggap gubernur tidak sejalan dengan kepentingan rakyat Bangka dan menggunakan cara-cara kekerasan untuk menghentikan penambangan TI yang merusak lingkungan, tetapi tidak memberi jalan keluar dari kesulitan ekonomi petani lada yang sedang menghadapi paceklik dalam harga. Di sisi lain, pamor Bupati Bangka Induk naik di mata para pengusaha dan penambang, karena mereka mendapatkan akses dalam bisnis pertimahan. Bupati Bangka yang mendukung para pengusaha dan penambang TI sekaligus memperoleh dua akses: *pertama*, modal politik, untuk memenangkan suara di periode kedua pemilihan gubernur langsung; dan *kedua*, modal ekonomi dari para pengusaha timah baru dalam pembiayaan semua kegiatan politik. Dengan kata lain, politik uang menjadi sangat penting dalam memenangkan suara untuk posisi gubernur. Dari wawancara dengan beberapa informan pada bulan Oktober 2009, jelas bahwa Bupati Bangka yang menang dalam Pilkada Gubernur Bangka-Belitung 2007, menerima suntikan dana, tidak hanya dari pengusaha timah lokal, tetapi juga dari pengusaha nasional. Di sini, gubernur dihadapkan untuk sebuah taruhan yang lebih besar.¹⁵ Kondisi ini juga tidak berbeda

¹⁴ Mereka adalah Ismiardi PDI-P, Johan Riduwan Hassan, Apik Rasyidi, Suwito Gunawan, Thamran, dan Ernawan Rebuin. Di dalam tahanan Mabes Polri di Jakarta, mereka juga mendapat tekanan-tekanan. Wawancara dengan Apik Rasyidi 18 Oktober, 2009.

¹⁵ Bantuan keuangan dari pengusaha nasional ini bukan tanpa disertai politik balas budi oleh gubernur dalam bentuk penyediaan akses hukum untuk beberapa bisnis yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan timah di Bangka. Melihat gejala ini, banyak orang di Bangka berkomentar "bahwa pulau Bangka telah digadaikan." Wawancara dengan berbagai informan di Pangkal Pinang 13 Oktober 2009.

dengan para bupati. Pada dasarnya tak satupun kampanye calon Bupati di Bangka Belitung dalam Pilkada langsung yang mengangkat isu kerusakan lingkungan akibat penambangan TI sebagai isu utama. Kondisi ini memang erat kaitannya dengan 'suntikan'dana kampanye mereka dari penambangan timah (Wawancara dengan nara sumber di Pangkal Pinang Juni 2005).

Setelah pergantian posisi Gubernur Pertama ke Gubernur Kedua Kep. Bangka-Belitung, debat-debat kontroversial mengenai penambangan TI dan kerusakan lingkungan semakin menurun intensitasnya. Kondisi ini seiring dengan terbentuknya gerakan sosial hijau, yang disebut Yayasan Babel Hijau Lestari pada Juli 2007. Pada prinsipnya, ada tiga tujuan utama (*Tri Karsa Utama*) Yayasan ini. *Pertama*, untuk merehabilitasi lahan kritis; *kedua*, untuk merehabilitasi lahan eks-pertambangan; *ketiga*, memanfaatkan lahan tidur. Yayasan itu diketuai oleh Syahidil, mantan tim sukses gubernur dan anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera, yakni partai pendukung kuat gubernur dalam memenangkan suara pada saat Pilkada (Wawancara dengan anggota PKS 18 Oktober 2009). Yayasan ini telah merangkul dua perusahaan timah lama, PT.Timah Bangka Tbk dan PT.Koba Tin, dan perusahaan timah baru yang tergabung dalam PT. Bangka Belitung Timah Sejahtera (PT. BBTS)¹⁶. Yayasan ini memiliki cabang-cabangnya di enam kabupaten, dan kantor perwakilan di Jakarta dengan tujuan untuk menciptakan jaringan atau kerjasama dengan negara lain.

Seberapa jauh politik proteksi lingkungan dipraktekkan Gubernur Babel? Beberapa program penghijauan telah dilakukan, sebagian merupakan implementasi dari kebijakan Presiden dan sebagian bekerjasama dengan perusahaan tambang. Program yang telah dijalankan adalah program percontohan pengelolaan lahan di daerah pascatambang seluas lima hektar, penanaman pohon dan pembuatan kompos, semuanya dibiayai oleh pengusaha Bangka Belitung dan Jakarta. Dalam mengimplementasikan program penghijauan, Yayasan bekerja sama dengan PT Timah Bangka Tbk dan PT. BBTS (Bangka Belitung Timah Sejahtera), misalnya penanaman pohon di sepanjang

¹⁶ Ada tujuh perusahaan yang bergabung dengan PT.BBTS dan mereka membentuk sebuah konsorsium setelah peristiwa kelabu Oktober 2006. Salah satu darinya termasuk pengusaha terkenal dari Jakarta (TW) yang memperoleh akses dalam pemasaran timah. Wawancara dengan beberapa informan di Pangkal Pinang, 13 Oktober 2009.

jalan menuju Bandara Udara Depati Amir (Wawancara dengan pengusaha di Pangkal Pinang 19 Oktober 2009). Program penanaman pohon tidak hanya dilaksanakan di ibukota provinsi, tetapi juga meluas ke tingkat kabupaten baik di pulau Bangka sendiri maupun di pulau Belitung.

Program-program penghijauan yang dilaksanakan atas inisiatif gubernur telah menjadikannya aktor yang dulu dikenal sebagai 'penyebab kerusakan lingkungan' menjadi 'pahlawan lingkungan'. Walaupun demikian, program-program perlindungan lingkungan dan cara menjalankannya sebenarnya memiliki beberapa tujuan. *Pertama*, sebagai pemenuhan 'janji politik tak tertulis' dengan Partai Keadilan Sejahtera yang telah mendukung dan mengantarkannya untuk menempati posisi orang nomor satu di provinsi (Wawancara dengan anggota PKS, 18 Oktober 2009). *Kedua*, untuk merubah tekanan internasional terhadap penambangan timah yang tidak memperhatikan lingkungan; dan *ketiga* adalah bertepatan dengan program kampanye nasional mengenai penanaman pohon. Dilihat dari cara-cara program perlindungan lingkungan dijalankan, tampaknya lebih dipolitisasi dan lebih seremonial daripada realitasnya. Karena itu, program ini tidak lepas dari banyaknya kritikan. Beberapa birokrat di bawahnya mempertanyakan program penanaman pohon yang seremonial dan begitu konsumtif, karena banyaknya biaya untuk berbagai hal, misalnya pakaian seragam, konsumsi, hiburan yang jauh lebih besar daripada hasil yang diperoleh. Apa yang dikatakan oleh Bupati Bangka Induk berikut ini memperlihatkan politisasi isu lingkungan, "Yang penting sehabis acara, lapor ke Menteri dan Presiden. Saya bisa kerahkan anggota saya dengan biaya 25.000 rupiah perhari untuk setiap orang yang bisa menanam 500 pohon"(Wawancara dengan nara sumber 18 Oktober 2009). Program penanaman pohon yang dilakukan misalnya dengan PT. BBTS hanya salah satu cara untuk 'menutupi' perluasan eksploitasi penambangannya yang semakin meluas dan merusak lingkungan.(Wawancara dengan nara sumber, 20 Oktober 2009).

Isu lingkungan yang tampak semakin dipolitisasi, bisa dilihat dari alokasi anggaran provinsi untuk lembaga yang mengelola lingkungan yakni Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) dengan tugas untuk memantau isu-isu lingkungan di tingkat provinsi. Anehnya, dinas ini kekurangan dana yang cukup besar untuk melakukan berbagai

kegiatannya, seperti sosialisasi dan pengawasan dampak lingkungan. Hampir tiga tahun lebih Gubernur kedua Babel ini menduduki jabatannya, nasib lembaga ini tidak banyak berubah. Ada upaya dari para pemimpin lembaga-lembaga untuk meningkatkan anggaran bagi pelaksanaan program, tetapi tetap gagal dan anggaran itu pun tersedot untuk dinas-dinas lain. Demikian pula untuk anggota DPRD Provinsi, juga gagal memberikan perhatian serius terhadap peningkatan anggaran untuk program keselamatan kerusakan lingkungan (Wawancara dengan nara sumber 17 Oktober 2009).

Dari penjelasan di atas tampak jelas bahwa kebijakan aktor-aktor negara dalam menangani masalah kerusakan lingkungan tampaknya tidak sesederhana sebagaimana tampak di permukaan. Ada persaingan politik dan ekonomi yang tersembunyi di balik debat-debat kontroversial mengenai penambangan TI dan kerusakan lingkungan. Masalah penanganan dalam pengelolaan tambang dan isu kerusakan lingkungan tampaknya lebih dipolitisir dan berada di bawah kondisi di mana para aktor pemerintah berkompetisi satu sama lain dalam usaha-usaha mereka memperoleh akses politik dan ekonomi yang lebih luas.

Aktor Masyarakat Lokal

Respon masyarakat lokal terhadap perubahan penggunaan lahan dan kerusakan lingkungan baik oleh eksploitasi dua perusahaan timah lama, perusahaan pertambangan baru dan para penambang TI, bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Sebagian masyarakat melakukan protes, dan sebagian lagi justru bersikap diam atau lebih akomodatif. Ada pula masyarakat yang pada awalnya melakukan protes, dan kemudian berbalik menjadi akomodatif, terutama setelah memperoleh keuntungan dari pembayaran kompensasi dari wilayah mereka yang ditambang. Jika dilihat, politik protes sebagian masyarakat Bangka tidaklah semata-mata ditujukan pada kerusakan lingkungan, tetapi juga terhadap hilangnya akses untuk sumberdaya ekonomi mereka dan konflik-konflik sosial antar berbagai kelompok masyarakat sebagai akibat perubahan sosial yang lebih luas.

Pada bagian ini ditunjukkan beberapa contoh kasus terdiferensiasinya respon masyarakat lokal di Bangka, baik di kalangan petani sendiri maupun masyarakat nelayan sendiri. *Pertama*, kelompok masyarakat petani yang tinggal di tanah pedesaan; *kedua* kelompok masyarakat

nelayan yang tinggal di sepanjang pantai. Masyarakat petani umumnya hidup dari berkebun lada, karet dan hanya sedikit dari mereka yang mencurahkan perhatian untuk bersawah. Bangka pernah menjadi penghasil lada putih ketiga di dunia pada tahun 1930an (Erwiza Erman 2005:108). Kemudian, masyarakat pesisir adalah masyarakat dari kelompok etnis beragam; Bangka Melayu, Bugis dan Makassar dan Buton yang telah menetap di Bangka sejak ratusan tahun lalu. Mereka umumnya hidup sebagai nelayan dan sejak zaman Belanda mengeksport hasil tangkapan ikan mereka ke Singapura dan Cina.

Baik masyarakat petani maupun nelayan memberikan respon yang berbeda terhadap penambangan dan masalah kerusakan lingkungan. Sebagian masyarakat petani memang resisten terhadap kerusakan lingkungan yang berdampak pada areal pertanian mereka, dan sebagian lagi justru ikut dan memperparah kondisi lingkungan. Bagi masyarakat petani padi di lumbung padi Bangka di kampung Rias, Bangka Selatan, yang mengalami kerugian akibat pencemaran air sawah mereka akibat *tailing*, mereka melakukan protes. Berbeda dengan sikap petani lada yang lain yang justru lebih akomodatif, dan bahkan mereka merubah kebun lada mereka menjadi 'kebun timah'. Akibat biaya produksi yang semakin meningkat, harga ada yang turun, dan bahkan kalah bersaing pula dengan harga lada Vietnam yang menggunakan pupuk alam, maka mereka beralih profesi menjadi penambang TI. Hal yang sama juga terjadi di kalangan masyarakat nelayan yang sebagian juga berpindah profesi dari nelayan menjadi penambang TI lepas pantai atau TI Apung. Peralihan profesi ini disebabkan karena biaya produksi melaut semakin tinggi sementara pendapatan sebagai penambang TI nampak lebih menjanjikan. Baik kelompok nelayan maupun kelompok petani yang beralih profesi sebagai penambang TI, tidak terlalu mengkhawatirkan masalah lingkungan (Wawancara dengan nara sumber Juni 2006).

Berbeda halnya bagi kelompok nelayan dan petani yang dirugikan, baik akibat penambangan maupun akibat perubahan tata guna tanah, lahan garapan ataupun sumberdaya ekonomi mereka yang hilang. Berbagai bentuk protes terbuka atau tertutup dilakukan. Misalnya, pada bulan September 2003, sekitar 1.120 warga di Air Anyut, Sungailiat telah membuat kesepakatan untuk menolak kehadiran penambang TI Apung di pantai, karena merusak pantai. Masyarakat meminta pemerintah untuk tidak memberikan izin kepada para penambang TI. Sayangnya,

permintaan ini tidak mendapatkan respon dari pemerintah. Protes-protes serupa juga terjadi di berbagai daerah lain. Protes para nelayan ini disebabkan karena mereka telah kehilangan akses terhadap sumber mata pencaharian mereka dan meningkatnya biaya-biaya produksi untuk melaut. Ikan sulit diperoleh di wilayah pesisir yang telah terkontaminasi oleh penambangan TI. Mereka harus mencari ikan di wilayah laut yang lebih jauh dari pantai, dan tentunya meningkatkan biaya produksi dan biaya-biaya lainnya, seperti bahan bakar dan barang-barang kebutuhan pokok. Pada tahun 2005, nelayan dihadapkan pada masalah semakin mengecilnya akses untuk mereka memperoleh bahan bakar yang semakin langka, mahal dan bahkan untuk mendapatkannya harus bersaing dengan penambang TI. Menyempitnya akses ke sumber pencaharian mereka telah berkombinasi pula dengan tekanan eksternal yang dihadapi nelayan Bangka, yakni persaingan dengan para nelayan asing (Thailand) yang memiliki teknologi penangkapan ikan yang canggih, yang menangkap ikan secara ilegal di sekitar perairan Bangka, terutama sejak krisis ekonomi regional 1997/1998.

Bentuk protes lingkungan yang lain bertumpang tindh dengan usaha mempertahankan akses sumberdaya laut yang diligitimasi dengan mitos, yang dapat memperkuat solidaritas masyarakat nelayan di kampung Rambat, Tritis, Kabupaten Bangka Barat. Protes dipimpin oleh seorang perempuan sekaligus 'dukun laut', ditujukan kepada Bupati Bangka Barat yang memberi izin tiga kapal isap yang akan mengambil timah sehabis-habisnya di wilayah perairan di sekitar Tritis. Protes terjadi pada Agustus 2009. Protes tersebut berhasil, ketiga kapal isap tidak jadi beroperasi. Protes para nelayan itu pada dasarnya berasal dari perjuangan mereka untuk membela laut yang merupakan sumber mata pencaharian pokok mereka. Tingkat solidaritas yang tinggi di kalangan masyarakat nelayan desa Rambat ini diperkuat oleh kepercayaan mereka terhadap mitos yang turun temurun. Mereka percaya bahwa akan terjadi bahaya jika mereka 'menjual laut mereka ke orang asing'¹⁷. Terlepas dari kepercayaan ini, yang jelas bahwa protes mereka yang diarahkan kepada ketiga kapal isap yang akan beroperasi di wilayah perairan mereka jelas membawa kerugian terhadap sumber mata

¹⁷ Setiap bulan Juni, penduduk desa melakukan upacara ritual, memberikan "sesajen" yang terdiri dari berbagai makanan untuk dipersembahkan kepada para penghuni laut. Jika upacara ini terlambat dilakukan, dukun laut diberi peringatan oleh para penghuni laut melalui mimpi.

pencaharian mereka. Sebab sumber pencaharian penduduk desa Rambat sebagai nelayan jauh lebih baik daripada masyarakat lain di sekitar pantai Bangka. Mereka memperoleh keuntungan 1,5 juta rupiah setiap melaut dan jaraknya juga tidak terlalu jauh dari pantai. Sementara para isteri nelayan dan kaum perempuan lainnya juga memperoleh sumber pendapatan sekitar 100.000 hingga 200.000 rupiah per hari, dari hasil mengumpulkan cacing laut di sepanjang pantai desa Rambat.

Protes nelayan juga bergantung pada metode yang digunakan untuk penambangan lepas pantai. Ironisnya, tidak ada protes nelayan selama beroperasinya kapal keruk milik PT.Timah Tbk sejak Orde Lama. Hal ini dikarenakan nelayan masih memiliki akses mengumpulkan pasir timah dari sisa-sisa penambangan timah (*tailing*) kapal keruk. Bahkan kadangkala mereka bekerja sama dengan para petugas kapal keruk dan nelayan untuk menyelundupkan timah ke luar Bangka. Berbeda dengan sistem penambangan yang menggunakan kapal isap yang mampu mengisap sehabis-habisnya pasir timah dari dasar laut. Akibatnya, kehadiran kapal isap menutup akses nelayan untuk mengumpulkan sisa-sisa pertambangan, sebagaimana terjadi sebelumnya. Protes terhadap beroperasinya kapal isap juga ditemukan di daerah-daerah lain, seperti di kampung Permis, Blinyu, Kabupaten Bangka Induk.(Wawancara dengan nara sumber 19 Oktober 2009).

Di kalangan masyarakat petani lada, protes terhadap kerusakan lingkungan akibat penambangan juga bersumber dari semakin sulitnya memperoleh air bersih di sungai. Petani lada membutuhkan air sungai yang bersih dan mengalir untuk merendam butir-butir lada mereka. Cara perendaman lada seperti ini akan menghasilkan kualitas lada putih yang bermutu tinggi yang telah lama dikenal di seluruh dunia di bawah merek "Mentok White Pepper." Banyaknya sungai yang tercemar di seluruh provinsi Bangka-Belitung sebagaimana dijelaskan sebelumnya, telah membawa kesulitan bagi petani lada. Kekurangan air bersih di sungai-sungai telah memaksa mereka merendam butir-butir lada dengan membuat bak-bak perendaman yang sama sekali tidak bisa mengharapakan air mengalir (Wawancara dengan nara sumber 12 Agustus 2005). Akibatnya, kualitas lada menurun dan berkombinasi dengan harga lada yang turun dari 90.000 rupiah per kilogram selama krisis ekonomi regional pada tahun 1998 menjadi 21.000 rupiah pada tahun 2003, dan bahkan mencapai titik terendah untuk 12.000 rupiah per

kilogram pada tahun 2005 (Wawancara dengan nara sumber November 2005). Selain penurunan kualitas lada putih, peningkatan biaya produksi terjadi karena semakin langkanya kayu-kayu junjungan untuk pohon-pohon lada, pupuk buatan yang mahal. Kayu sulit diperoleh karena hutan rusak akibat penambangan TI dan penambangan liar, dan perkebunan kelapa sawit yang semakin luas milik para pengusaha Malaysia dan Bangka.

Terlalu banyak contoh protes dan sikap akomodatif masyarakat nelayan dan petani untuk dijelaskan dalam artikel terbatas ini, tetapi yang patut dicatat di sini adalah respon masyarakat lokal Bangka, terutama petani dan nelayan, tergantung pada banyak hal, terutama pada hilang/terancam atau tidak hilang/terancamnya mata pencaharian mereka. Sebagian mereka bersikap lebih akomodatif terhadap kerusakan lingkungan, terutama yang telah beralih profesi ke penambang, atau mereka yang masih memiliki akses dalam memperoleh keuntungan dari sisa-sisa penambangan. Sementara protes terhadap kerusakan lingkungan akibat penambangan, adalah sikap mempertahankan klaim atas tanah, laut dan air sungai untuk kesejahteraan hidup mereka dan protes terhadap berbagai ancaman yang akan mempersempit ruang gerak masyarakat terhadap akses yang mereka miliki sebelumnya. Keragaman politik masyarakat terhadap tambang dan persoalan lingkungan sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa contoh di atas, bisa dianggap sebagai sebuah 'jendela' untuk melihat perjuangan mempertahankan akses terhadap sumber mata pencaharian mereka yang sedang terancam. Dalam perjuangan tersebut, mereka berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kuasa politik dan ekonomi, baik pemerintah maupun pengusaha pada lingkup yang lebih luas.

SIMPULAN

Dalam perspektif sejarah terungkap bahwa ada keragaman politik dengan aktor yang memperjuangkan akses untuk penambangan dan isu lingkungan. Kontrol pemerintah terhadap sumberdaya timah telah berlangsung sejak masa VOC, akan tetapi sejak masa pemerintah kolonial Belanda, kontrol diperkuat dan akses penduduk untuk menambang dan memasarkan timah tertutup sampai masa Orde Baru.

Usaha-usaha untuk meraih kontrol terhadap timah menimbulkan konflik

antara aktor-aktor pemerintah pribumi/kabupaten/kota dengan gubernur dan antarnegara imperialis (Belanda dan Inggris), dan antara masyarakat dengan pemerintah (era kolonial dan era Reformasi). Konflik dalam pengontrolan sumberdaya timah tersebut justru telah membawa konflik bersenjata (*armed conflict*) yang terjadi pada pertengahan abad ke-19 dan di era Reformasi (2006). Hal ini merefleksikan ketepatan analisis Phillipe Le Billon (2001) untuk negara-negara produsen sumberdaya mineral dan energi yang cenderung ke arah konflik bersenjata.

Liberalisasi dalam sistem penambangan timah yang terjadi di era Reformasi dan otonomi daerah telah memunculkan desentralisasi dan proses demokratisasi dalam bisnis penambangan timah. Kontrol ketat negara dari pusat semakin berkurang, dan proses desentralisasi dalam pengontrolan sumberdaya timah sedang terjadi. Walaupun demikian, proses ini telah menimbulkan perdebatan kontroversial di kalangan dan antara aktor-aktor negara di pusat dan daerah. Perdebatan itu mencerminkan heterogenya aktor-aktor negara. Sikap politik mereka yang pro dan kontra terhadap isu-isu tersebut atau sikap diam yang dilakukan oleh para aktor negara yang mencalonkan diri menjadi Bupati, mencerminkan perjuangan mereka yang tersembunyi terhadap usaha-usaha untuk mendapatkan akses politik dan ekonomi dalam konteks yang lebih luas. Konflik sumberdaya timah dan kerusakan lingkungan beriring sejalan dengan konflik pusat-daerah, antarpantai dan konflik individual untuk memiliki posisi nomor satu dalam jajaran pemerintahan provinsi Babel.

Diversitas politik lingkungan dan pengelolaan sumberdaya timah juga ditemukan pada masyarakat setempat. Adanya sikap pro dan kontra yang dicerminkan dengan politik protes dan akomodatif di kalangan dan di dalam masyarakat petani dan nelayan Bangka terhadap sumberdaya tambang dan isu kerusakan lingkungan beriring sejajar pula dengan hilang atau tidak hilangnya akses untuk sumber penghidupan mereka. Politik protes petani atau nelayan terhadap sistem penambangan yang sedang mengalami proses demokratisasi dengan adanya penambangan TI dan perusahaan-perusahaan baru, adalah karena hilangnya akses mereka ke sumber-sumber mata pencaharian. Selain itu, politik protes juga diarahkan pada sistem penambangan apakah dengan menggunakan kapal keruk atau kapal isap. Dengan kata lain, sikap protes itu bersamaan dengan semakin menyempitnya akses mereka untuk sumber-sumber

ekonomi. Begitu juga sebaliknya, politik akomodatif di kalangan petani atau nelayan Bangka juga bersumber dari keuntungan yang diperoleh dari penambangan. Kondisi ini bukan berarti mereka tidak sadar akan dampak lingkungan dari pertambangan yang mereka lakukan. Melihat keragaman politik lingkungan aktor-aktor pemerintah dan masyarakat ini, maka dapat disimpulkan bahwa konflik mengenai kontrol sumberdaya tambang dan isu kerusakan lingkungan adalah merupakan 'jendela' untuk melihat konflik-konflik lain yang bertumpang tindih.

PUSTAKA ACUAN

Buku dan Jurnal

- Banks, Glenn. 2003. "Mining and the environment in Melanesia: Contemporary Debates reviewed", dalam *The Contemporary Pacific*, Volume 14. No. 1. 39-46.
- Ballard, C and Glenn Banks (2003). "Resource Wars: The Anthropology of Mining" dalam *Annual Review of Anthropology*. No.32:287-313.
- Erman, Erwiza. 2007."Deregulation of the Tin Trade and Creation of a Local Shadow State: Case Study of Bangka Tin Mine", hlm..180 dalam Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken (eds.) *Regenotiating Boundaries: Local Politics in Post Suharto Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- _____.2008. "Menelusuri Hubungan Bisnis Timah Negara Melayu Masa Lalu dan Refleksinya untuk Masa Kini". Makalah dipresentasikan dalam "Dialog Ke-Melayuan," diadakan oleh Pusat Studi Melayu, Universitas Hasanuddin, Makassar, 13 -14 Oktober 2008.
- _____. 2008. "Rethinking Legal and Illegal Economy: A Case Study of Tin Mining in Bangka Island", dalam *History and Culture of South East Asia*. Vol.37. 91-111.
- _____. 2009. "Menelusuri Sejarah Pemerintahan di Pulau Timah, dalam Erwiza Erman, *Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap: Sejarah Timahdi Bangka-Belitung*. Yogyakarta: Ombak.
- Dinas Perindustrian. 2004. *Daftar Eksportir/Importer dan Realisasi Ekspor dan Impor 2004*. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Provinsi Bangka Belitung tahun.
- Epp, Franz. 1852.*Schilderung aus Hollandsch-Oostindien*. Heidelberg. J.C.B. Mohr.
- Heidhuis, Mary Somer(1992). *Bangka Tin and Mentok Pepper: Chinese Settlement on an Indonesian Island*. Singapore: ISEAS.
- Heilbig, Karl. 1940. "Die Insel Bangka. Beispiel des Landschafts-und Bedeutungs-

wandels auf Grund einer geograpischen “Zufallsform” dalam *Geographische Blatter*. 43.nos.3/4. 133-207.

Hirsch Philip and Carol Warren (ed.).1998. *The Politics of Environment in Southeast Asia: Resources and Resistance*. New York: Routledge.

Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan no. 146/MPP/Keop/4/Tahun 1999.

Le Billon, Phillippe.2001. “The Political ecology of war: natural resources and armed conflicts”, dalam *Political Geography* 20 (2001):561-584.

Metro Babel, “Pemanfaatan Kolong Eks Tambang Belum Serius.” 52/tahun Edition II / 18 24 September 2008.

Newell, Peter John. 2005. “Race, Class and the Global Politics of Environmental Inequality” dalam *Global Environmental Politics* - Volume 5, Number 3, August 2005: 70-94

Peluso, Nancy Lee dan Jesse C. Ribot, 2003. “A Theory of Access “ dalam *Rural Sociology* 68 (2).

Schuurman, J.A. 1898. “Historische schets van de tinwinning op Banka, II. *Journal Mining of Nederlands-Indies* 48 (1919): 1-388.

Susilo, Joko and Siti Maimunah. 2009. *Tiga Abad Melayani Dunia: Potret Tambang Timah Bangka-Belitung*. Jakarta: JATAM.

Suyitno, Sutedjo. 1996. *Sejarah Timah Indonesia*. Jakarta:PT Gramedia.

Zulkarnain, Iskandar. 2006. *Konflik di Kawasan Pertambangan Umum Bangka Belitung: Persoalan dan Alternatif Pemecahan*. Jakarta: LIPI Press.

Internet

<http://www.terranel.or.id/beritanya.php.id>

<Http://www.timah.com/pt-tambang-timah/scope.htm>

Surat Kabar

Kompas 18 Desember 2001

Kompas 4 April 2002

Bangka Pos 16-12-2003; 16-9-2003.

Bangka Pos 13-11-2004

Bangka Belitung Post 27-4-2005